



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PENGAWASAN

MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

Daftar Isi

1. Laporan hasil monitoring evaluasi pengelolaan sippn dan sp4n lapor 2019



**LAPORAN HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN SIPPN DAN SP4N-LAPOR! 2019**

HARRIS VERTU HOTEL HARMONI
HAYAM WURUK NO 6, JAKARTA PUSAT

5 FEBRUARI 2020

DILAKSANAKAN OLEH:
TARNOTO
DILLON DAVIN ZEBADIAH
ANDI SITI CHADIDJAH B

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
2020

Nomor : 73 /2900/PW.01/02/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

LAPORAN HASIL RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SIPPN DAN SP4N-LAPOR! 2019

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25/2009 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
5. Surat Undangan dari Kemenpan RB Nomor B/15/PP.03/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! 2019;
6. Surat Tugas Inspektur Mahkamah Konstitusi Nomor: 9/2900/02/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang penugasan Sdr. Tarnoto, Dillon Davin Zebadiah dan Andi Siti CB untuk menghadiri Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Latar Belakang

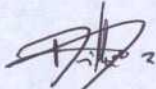
Dalam rangka upaya implementasi kebijakan pelayanan publik secara optimal dan terkoordinir atau terintegrasi dengan baik sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB mulai memantapkan kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital dan terpadu untuk mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik baik itu pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, dan pengawasan pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik telah mengirimkan surat Nomor: B/15/PP.03/2020 tanggal 24 Januari 2020 dengan perihal Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! 2019 di seluruh Kementerian/Lembaga. Memperhatikan hal tersebut, Inspektur Mahkamah Konstitusi menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai untuk mengikuti

Demikian laporan ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan.

Pegawai yang ditugaskan,

Calon Auditor,



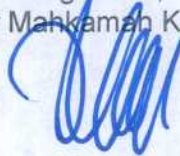
Dillon Davin Zebadiah
NIP. 19911013 201801 1 003

Calon Auditor,



Andi Siti C B
NIP. 19840802 201801 2 001

Mengetahui,
Inspektur Mahkamah Konstitusi



Pawit Haryanto, S.H., M.M.
NIP. 19640217 198503 1 002